ABSTRAK

Annisa Wardatul Firdaus, 126102201072, Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung), Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci: *Pengarusutamaan Gender, Pendidikan, Keadilan.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesadaran terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender yang berkeadilan. Laki-laki dan perempuan memiliki kondisi biologis yang berbeda sehingga perlu perhatian khusus di ruang publik. Instansi pendidikan sebagai salah satu penyedia layanan publik sebab pendidikan sebagai hak esensial setiap individu yang dapat diakses kapanpun dan siapapun tanpa pengecualian perlu mewujudkan kesetaraan. Demikian perlu adanya upaya integrasi gender untuk mencapai kesetaraan dengan PUG. PUG melalui pendidikan menjadi salah satu cara awal untuk membangun sumber daya manusia yang berintelektual dengan pemikiran terbuka terhadap kesetaraan gender yang berkeadilan. Terbentuknya kesetaraan menjadi upaya perwujudan keadilan yang subtansif, yakni keadilan hakiki yang mempertimbangkan pengalaman biologis dan sosialnya sehingga menciptakan lingkungan belajar (pendidikan tinggi) yang lebih merata, inklusif dan memberdayakan semua individu tanpa memandang jenis kelamin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pengarusutamaan gender pada birokrasi di UIN SATU? (2) Bagaimana implementasi pengarusutamaan gender pada program kegiatan tri dharma perguruan tinggi? (3) Bagaimana implementasi pengarusutamaan gender pada penyediaan fasilitas? dan (4) Bagaimana implementasi pengarusutamaan gender dalam perspektif keadilan hakiki perempuan? Adapun tujuan penelitian yakni mendeskripsikan implementasi PUG pada aspek birokrasi, program kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan fasilitas yang tersedia di UIN SATU, serta menganalisis implementasi PUG di UIN SATU dalam perspektif keadilan hakiki perempuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Pengumpulan data yang digunakan penelitian ini berupa pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan analisa data peneliti menggunakan kondensasi data, penyajian data dan verifikasi. Kemudian peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pengarusutamaan gender pada birokrasi di UIN SATU memberikan kuota pada perempuan dalam jabatan struktural. Adapun prosentase angka keterlibatan perempuan dalam birokrasi di UIN SATU menyentuh angka 35 % dari 114 pejabat akademik

periode 2023-2027. Demikian menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam birokrasi yang mana 65% birokrasi masih didominasi laki-laki. (2) Implementasi pengarusutamaan gender pada program kegiatan tri dharma perguruan tinggi mengupayakan pemenuhan kebutuhan khusus. Adapun upaya pemenuhan khusus pada kegiatan pengabdian yang memberikan wadah secara inklusif untuk yang berkebutuhan khusus seperti ibu hamil. Kegiatan ini bertujuan menarik partisipasi pada pihak berkebutuhan khusus agar turut serta pada program kegiatan salah satunya KKN Inklusif. (3) Implementasi pengarusutamaan gender pada penyediaan fasilitas memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan fasilitas. Akses yang sama juga menimbang kelayakan atas fasilitas yang disediakan, salah satunya kelayakan dari fungsional fasilitas. Adapun maksud kelayakan dengan akses yang sama seperti pemisahan toilet laki-laki dan perempuan. (4) Implementasi pengarusutamaan gender di UIN SATU dalam perspektif keadilan hakiki perempuan belum mewujudkan keadilan sepenuhnya. Pada birokrasi secara biologis pembentukan jabatan struktural belum mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan, sedangkan secara sosial jabatan struktural didominasi oleh lelaki sebab perempuan mengalami marginalisasi. Marginalisasi perempuan tersebut sebab adanya beban berlebih yang dipikul sehingga terhambat dalam mememenuhi kualifikasi persyaratan. Pada program kegiatan tri dharma perguruan tinggi pengalaman biologis diberikan perhatian dan upaya khusus agar dapat mengikuti kegiatan tersebut, tetapi dalam pengalaman sosial sebagian pihak sulit berpartisipasi sebab adanya marginalisasi, pelabelan negatif juga beban ganda yang melekat pada seseorang. Pada penyediaan fasilitas pengalaman biologis belum difasilitasi sepenuhnya seperti belum tersedia ruang laktasi, sebagian lain terfasilitasi seperti akses penghubung lantai terdapat tangga dan *lift;* toilet yang terpisah, dan musholla yang tertutup. Sedangkan pengalaman sosial pada penyediaan fasilitas semua memiliki partisipasi yang sama dalam akses, kontrol dan manfaat atas fasiltas yang tersedia, meski kelayakan dan kenyamanan atas fasilitas tersebut belum diperoleh kelayakan dan kenyamanan sebab keberfungsian dan intensitas penggunaan yang berbeda.

ABSTRACT

Annisa Wardatul Firdaus, 126102201072, Implementation of Gender Mainstreaming in the Perspective of Women's Ultimate Justice (Study at UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung), Islamic Family Law Study Programme, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Prof Dr Iffatin Nur, M.Ag.

Keywords: Gender Mainstreaming, Education, Justice.

This research is motivated by the awareness of gender mainstreaming (PUG) as a strategic step in achieving equitable gender equality. Men and women have different biological conditions that require special attention in the public sphere. Educational institutions as one of the public service providers, because education as an essential right of every individual, accessible at any time and to everyone without exception, needs to achieve equality. Therefore, there is a need for gender integration efforts to achieve equality with PUG. PUG through education is one of the first ways to build intellectual human resources open to gender equality. Achieving equity is an effort to achieve substantive justice, i.e. real justice that takes into account biological and social experiences in order to create a learning environment (higher education) that is more equitable, inclusive and empowering for all individuals regardless of gender.

The formulation of the problems in this study are (1) How is the implementation of gender mainstreaming in the bureaucracy at UIN SATU? (2) How is the implementation of gender mainstreaming in the programme of Tri Dharma activities in higher education? (3) How is the implementation of gender mainstreaming in the provision of facilities? and (4) How is the implementation of gender mainstreaming in the perspective of women's ultimate justice? The research aims to describe the implementation of gender mainstreaming in the bureaucratic aspect, the Tri Dharma activities programme and the facilities available at UIN SATU, and to analyse the implementation of gender mainstreaming at UIN SATU from the perspective of women's ultimate justice. In this study, the researchers used qualitative methods and field research. The data collection used in this research is in the form of observation, in-depth interviews and documentation. While analysing the data, the researchers used data condensation, data presentation and verification. Then the researcher checks the validity of the data using triangulation techniques.

The results showed that (1) the implementation of gender mainstreaming in the bureaucracy at UIN SATU provides a quota for women in structural positions. The percentage of women's participation in the bureaucracy at UIN SATU reached 35% of 114 academic officials for the period 2023-2027. This shows the existence of gender inequality in the bureaucracy, where 65% of the bureaucracy is still dominated by men. (2) The implementation of gender mainstreaming in the Tri Dharma of Higher Education Activity Programme seeks

to fulfil special needs. The special fulfilment efforts in community service activities provide an inclusive forum for those with special needs such as pregnant women. This activity aims to attract the participation of parties with special needs to participate in activity programmes, one of which is Inclusive KKN. (3) The implementation of gender mainstreaming in the provision of facilities provides equal access for men and women in the use of facilities. Equal access also takes into account the feasibility of the facilities provided, one of which is the feasibility of functional facilities. The meaning of feasibility in the context of equal access is, for example, the separation of male and female toilets. (4) The implementation of gender mainstreaming in UIN SATU from the perspective of women's ultimate justice has not fully realised justice. In the bureaucracy, biologically, the formation of structural positions has not taken into account the biological experience of women, while socially, structural positions are dominated by men because women experience marginalisation. The marginalisation of women is due to the excessive burden they carry, which prevents them from fulfilling the qualification requirements. In the programme of activities of the Tri Dharma College, special attention and efforts are given to the biological experience so that it can participate in these activities, but in the social experience some parties find it difficult to participate due to marginalisation, negative labelling as well as the double burden placed on a person. In the provision of biological experience, facilities have not been fully facilitated such as the breastfeeding room is not yet available, some others are facilitated such as access to connecting floors where there are stairs and lifts; separate toilets and closed prayer rooms. While the social experience in the provision of facilities all have equal participation in access, control and benefits of the facilities available, although the feasibility and comfort of these facilities have not been achieved feasibility and comfort because of different functionality and intensity of use.

الملخص

أنيسة وردات الفردوس، ١٢٦١٠٢٢٠١٠٧٢، تطبيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظور العدالة المطلقة للمرأة (دراسة في جامعة سيد علي رحمة الله تولونغاغونغ)، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، السيد علي رحمة الله سيد علي رحمة الله الجامعة الإسلامية الحكومية تولونغاغونغ، ٢٠٢٤، المشرف: أستاذ، دكتوراه، دكتوراه، عفتين نور، ماجستير في الدين

الكلمات المفتاحية: تعميم مراعاة المنظور الجنساني، التعليم، العدالة.

الدافع وراء هذا البحث هو الوعي بتعميم مراعاة المنظور الجنساني كخطوة استراتيجية في تحقيق المساواة العادلة بين الجنسين. يتمتع الرجال والنساء بظروف بيولوجية مختلفة تحتاج إلى اهتمام خاص في المجال العام. المؤسسات التعليمية كأحد مقدمي الخدمات العامة لأن التعليم كحق أساسي لكل فرد يمكن الوصول إليه في أي وقت ولأي شخص دون استثناء يحتاج إلى تحقيق المساواة. وبالتالي، هناك حاجة إلى بذل الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التعليم. إن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التعليم هو أحد السبل الأولى لبناء الموارد البشرية الفكرية بعقل منفتح نحو تحقيق المساواة العادلة بين الجنسين. إن تحقيق المساواة هو جهد لتحقيق العدالة الجوهرية، أي العدالة الحقيقية التي تأخذ بعين الاعتبار الخبرات البيولوجية والاجتماعية من أجل خلق بيئة تعليمية (التعليم العالي) أكثر إنصافاً وشمولاً وتمكيناً لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس.

وتتمثل صياغة المشكلات في هذه الدراسة في (١) كيف يتم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البيروقراطية في جامعة جنوب أفريقيا للعلوم والتكنولوجيا؟ (٢) كيف يتم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برنامج أنشطة الدارما الثلاثية للتعليم العالي؟ (٣) كيف يتم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في توفير المرافق؟ (٤) كيف يتم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني من منظور العدالة المطلقة للمرأة؟ يهدف البحث إلى وصف تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الجانب البيروقراطي، وبرنامج أنشطة الدارما الثلاثية والمرافق المتاحة في جامعة العلوم التطبيقية في سانت كاترين، وتحليل تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جامعة العلوم التطبيقية في سانت كاترين من منظور العدالة النهائية للمرأة. استخدم الباحثون في هذه الدراسة الأساليب النوعية والبحث الميداني. تم جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث في شكل ملاحظة ومقابلات متعمقة وتوثيق. وأثناء

تحليل البيانات، استخدم الباحثون تكثيف البيانات وعرض البيانات والتحقق منها. ثم تحقق الباحث من صحة البيانات باستخدام تقنيات التثليث.

أظهرت النتائج أن (١) تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الجهاز البيروقراطي في جامعة سيد علي رحمة الله تولونغاغونغ الإسلامية الحكومية يوفر حصة للمرأة في المناصب الهيكلية. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الجهاز البيروقراطي في جامعة سيد علي رحمة الله تولونغاغونغ الإسلامية الحكومية ٣٥% من أصل ١١٤ مسؤولاً أكاديمياً للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧. وهذا يدل على وجود عدم مساواة بين الجنسين في الجهاز البيروقراطي حيث لا يزال الرجال يهيمنون على ٦٥% من الجهاز البيروقراطي. (٢) يسعى تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برنامج الأنشطة الثلاثية للتعليم العالي إلى تلبية الاحتياجات الخاصة. وتوفر جهود تلبية الاحتياجات الخاصة في أنشطة خدمة المجتمع منتدى شامل لذوي الاحتياجات الخاصة مثل النساء الحوامل. ويهدف هذا النشاط إلى استقطاب مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في برامج الأنشطة، وأحدها محاضرة العمل الحقيقي الشامل. (٣) يوفر تطبيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في توفير المرافق إمكانية الوصول المتساوي بين الرجال والنساء في الاستفادة من المرافق. وتراعي المساواة في الوصول المتكافئ أيضًا جدوى المرافق المقدمة، وأحدها جدوى المرافق الوظيفية. معنى الجدوى مع المساواة في الوصول مثل فصل مراحيض الرجال عن مراحيض النساء.(٤) إن تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جامعة جنوب أفريقيا للعلوم والتكنولوجيا من منظور العدالة المطلقة للمرأة لم يحقق العدالة بشكل كامل. ففي البيروقراطية، من الناحية البيولوجية، لم يراعِ تشكيل المناصب الهيكلية في البيروقراطية التجربة البيولوجية للمرأة، بينما من الناحية الاجتماعية، يهيمن الرجال على المناصب الهيكلية لأن المرأة تعاني من التهميش. ويرجع تهميش المرأة إلى العبء الزائد الذي تتحمله بحيث يتم إعاقة استيفاء متطلبات التأهيل. في برنامج أنشطة كلية دارما الثلاثية تحظى الخبرة البيولوجية باهتمام وجهود خاصة حتى تتمكن من المشاركة في هذه الأنشطة، ولكن في الخبرة الاجتماعية تجد بعض الأطراف صعوبة في المشاركة بسبب التهميش والوصم السلبي وكذلك العبء المضاعف الذي يلقى على الشخص. في توفير الخبرة البيولوجية لم يتم تسهيل التسهيلات بشكل كامل مثل غرفة الرضاعة غير متوفرة حتى الآن، وبعضها الآخر ميسر مثل الوصول إلى الطوابق المتصلة فهناك سلالم ومصاعد، ودورات مياه منفصلة، وغرف مغلقة للصلاة. في حين أن التجربة الاجتماعية في توفير المرافق يتساوى الجميع في الوصول إلى المرافق المتاحة والتحكم فيها والاستفادة منها، على الرغم من عدم

الحصول على الجدوى والراحة من هذه المرافق الجدوى والراحة بسبب اختلاف وظائفها وكثافة استخدامها.